



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019



BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019



BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

Laporan Keuangan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 disusun dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2019, disamping untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Dengan adanya laporan tahunan ini dapat dipergunakan sebagai bahan untuk pembuatan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Laporan Keuangan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 masih mempunyai kekurangan, untuk itu kami menerima masukan dan kritikan dari berbagai pihak. Akhirnya semoga Laporan Keuangan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Payakumbuh, Februari 2020

**KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



IRWANDI, S.Sos.MM
NIP. 19660913 198603 1 009

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e), Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Payakumbuh, Februari 2020

**KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN/LIMA PULUH KOTA**



IRWANDI, S.Sos.MM
NIP. 19660913 198603 1 009

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Daftar Isi	iii
LRA Permendagri No.13 Th 2006	v
LRA Permendagri No.64 Th 2013	vi
Laporan Operasional	vii
Laporan Operasional Ringkas	viii
Laporan Perubahan Ekuitas	ix
NERACA	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	5
2.1 Ekonomi Makro	5
2.2 Kebijakan Keuangan	5
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	5
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	8
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	11
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan	11
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11

	4.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12
	4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
	4.5 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan	17
	4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah	18
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
	5.1 Laporan Realisasi Anggaran	21
	5.2 Laporan Operasional	23
	5.3 Neraca	28
	5.4 Laporan Perubahan Ekuitas	33
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	36
	6.1 Kedudukan.....	36
	6.2 Struktur Organisasi	36
	6.3. Aspek Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	37
BAB VII	PENUTUP	38

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/ Kurang	%
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
4.1.1	Pajak Daerah	28.500.000.000,00	24.181.111.740,00	84,85	4.318.888.260,00	15,15
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	89.181.000,00	155.005.500,00	173,81	(65.824.500,00)	-73,81
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.967.700.000,00	2.675.284.188,00	90,45	282.415.812,00	9,55
4.1.4	Lain-lain PAD yang Syah	17.811.940.100,00	14.519.647.799,92	81,52	3.292.292.300,08	18,48
	JUMLAH PENDAPATAN	49.358.821.100,00	41.531.049.227,92		(7.827.771.872)	
5	BELANJA					
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
5.1.1	Belanja Pegawai	17.048.122.006,00	15.893.132.603,00	93,23	1.154.989.403,00	6,77
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	17.048.122.006,00	15.893.132.603,00	93,23	1.154.989.403	6,77
5.2	BELANJA LANGSUNG					
5.2.1	Belanja Pegawai	4.243.971.000,00	3.962.991.000,00	93,38	280.980.000,00	6,62
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.879.115.570,00	6.809.443.194,00	86,42	1.069.672.376,00	13,58
5.1.3	Belanja Modal	2.151.747.500,00	2.107.408.241,00	97,94	44.339.259,00	2,06
5.1.4	Jumlah Belanja Langsung	14.274.834.070,00	12.879.842.435,00	90,23	1.394.991.635	9,77
	JUMLAH BELANJA	31.322.956.076,00	28.772.975.038,00	91,86	2.549.981.038	8,14
C	SURPLUS/ (DEFISIT)	18.035.865.024,00	12.758.074.189,92	70,74	5.277.790.834	

SariIamak, Februari 2020
KEPALA BADAN KEUANGAN



IRWANDI, S.Sos. MIM
Nip. 19660913 198603 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Permendagri 64/2013)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.1.1	Pajak Daerah-LRA	28.500.000.000,00	24.181.111.740,00	84,85	20.369.954.187,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	89.181.000,00	155.005.500,00	173,81	139.388.500,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.957.700.000,00	2.675.284.188,00	90,45	2.425.073.057,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Syah	17.811.940.100,00	14.519.647.799,92	81,52	11.545.050.208,03
	JUMLAH PAD	49.358.821.100,00	41.531.049.227,92	84,14	34.479.465.952,03
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.1	Belanja Pegawai	18.480.493.006,00	17.191.173.603,00	93,02	19.245.635.074,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.690.715.570,00	9.474.393.194,00	88,62	5.602.585.968,00
5.1.5	Belanja Hibah				
5.1.6	Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi	29.171.208.576,00	26.665.566.797,00	91,41	24.848.221.042,00
5.2	BELANJA MODAL				
5.2.1	Belanja Tanah				
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.823.147.500,00	1.784.466.500,00	97,88	234.513.000,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	328.600.000,00	322.941.741,00	98,28	33.916.000,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal	2.151.747.500,00	2.107.408.241,00	97,94	268.429.000,00
	JUMLAH BELANJA	31.322.956.076,00	28.772.975.038,00	91,86	25.116.650.042,00
C	SURPLUS/ (DEFISIT)	18.035.865.024,00	12.758.074.189,92	70,74	9.362.815.910,03

Sariiamak, Februari 2020
KEPALA BADAN KEUANGAN

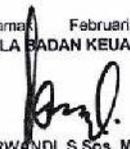


IRWANDI, S.Sos. MM
Nip. 19660913 198603 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KEUANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

KODE AKUN	Uraian	2019	2018	Bertambah/ Berkurang	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN				
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.290.364.742,92	35.780.762.114,03	7.509.602.628,89	20,99
8.1.1	Pajak Daerah-LO	25.840.427.255,00	21.672.917.019,00	4.267.510.238,00	19,89
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	155.005.500,00	139.388.500,00	15.617.000,00	11,20
8.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.675.284.188,00	2.425.073.057,00	250.211.131,00	10,32
8.1.4	Lain-lain PAD yang Syah	14.519.647.799,92	11.543.383.538,03	2.976.264.261,89	25,78
	JUMLAH PAD	43.290.364.742,92	35.780.762.114,03	7.509.602.628,89	20,99
8.2	PENDAPATAN TRANSFER				
8.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	-	-	-	-
8.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
8.2.1.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
8.2.1.03	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
8.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
8.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	-	-	-	-
8.2.2.01	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
8.2.2.03	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
8.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	-	-	-	-
8.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	-	-	-	-
8.2.3.01.01	BH Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
8.2.3.01.02	BH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
8.2.3.01.03	BH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
8.2.3.01.04	BH Pajak Air Permukaan	-	-	-	-
8.2.3.01.05	BH Pajak Rokok	-	-	-	-
8.2.3.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH TRANSFER	-	-	-	-
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
8.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
8.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	43.290.364.742,92	35.780.762.114,03	7.509.602.628,89	20,99
9	BEBAN	28.314.233.376,10	26.346.655.846,22	1.967.577.529,88	7,47
9.1	BEBAN OPERASI	28.314.233.376,10	26.346.655.846,22	1.967.577.529,88	7,47
9.1.1	Beban Pegawai	17.191.173.603,00	19.245.635.074,00	(2.054.461.471,00)	-10,67
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	9.493.132.226,00	5.569.025.735,00	3.924.106.491,00	40,46
	Beban Persediaan	565.133.598,00	421.178.274,00	143.955.324,00	34,16
	Beban Jasa	6.510.052.572,00	3.440.222.013,00	3.069.830.559,00	46,23
	Beban Pemeliharaan	100.815.000,00	83.999.500,00	16.815.500,00	16,21
	Beban Perjalanan Dinas	2.317.331.056,00	1.643.625.948,00	673.705.108,00	40,99
9.1.3	Beban Bunga	-	-	-	-
9.1.4	Beban Subsidi	-	-	-	-
9.1.5	Beban Hibah	-	-	-	-
9.1.6	Beban Sosial	-	-	-	-
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	929.318.439,71	620.436.390,77	308.882.048,94	49,78
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	683.074.707,39	910.659.646,45	(217.583.939,06)	-23,89
9.1.9	Beban Lain-Lain	7.534.400,00	900.000,00	6.634.400,00	88,19
9.2	BEBAN TRANSFER				
	JUMLAH BEBAN	28.314.233.376,10	26.346.655.846,22	1.967.577.529,88	7,47
	SURPLUS/ (DEFISIT)-LO	14.976.131.366,82	9.434.106.267,81	5.542.025.099,01	58,74

Sarilama, Februari 2020
KEPALA BADAN KEUANGAN


IRWANDI, S.Sos. MM
NIP. 19660913 198603 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KEUANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

KODE AKUN	Uraian	2019	2018	Bertambah/ Berkurang	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN				
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.290.364.742,92	35.780.762.114,03	7.509.602.628,89	20,99
8.1.1	Pajak Daerah-LO	25.540.427.255,00	21.672.917.019,00	4.267.510.236,00	19,69
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	155.005.500,00	139.388.500,00	15.617.000,00	11,20
8.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.675.284.188,00	2.425.073.057,00	250.211.131,00	10,32
8.1.4	Lain-lain PAD yang Syah	14.519.647.799,92	11.543.383.538,03	2.976.264.261,89	25,78
	JUMLAH PAD	43.290.364.742,92	35.780.762.114,03	7.509.602.628,89	20,99
	JUMLAH PENDAPATAN	43.290.364.742,92	35.780.762.114,03	7.509.602.628,89	20,99
9	BEBAN	28.314.233.376,10	26.346.655.846,22	1.967.577.529,88	7,47
9.1	BEBAN OPERASI	28.314.233.376,10	26.346.655.846,22	1.967.577.529,88	7,47
9.1.1	Beban Pegawai	17.191.173.603,00	19.245.635.074,00	(2.054.461.471,00)	-10,67
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	9.493.132.226,00	5.569.025.735,00	3.924.106.491,00	70,46
9.1.3	Beban Bunga				
9.1.4	Beban Subsidi				
9.1.5	Beban Hibah				
9.1.6	Beban Sosial				
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	929.318.439,71	620.436.390,77	308.882.048,94	49,78
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	693.074.707,38	910.658.646,45	(217.583.939,06)	-23,99
9.1.9	Beban Lain-Lain	7.534.400,00	900.000,00	6.634.400,00	
9.2	BEBAN TRANSFER				
	JUMLAH BEBAN	28.314.233.376,10	26.346.655.846,22	1.967.577.529,88	7,47
	SURPLUS/ (DEFISIT)-LO	14.976.131.366,82	9.434.106.267,81	5.542.025.099,01	58,74

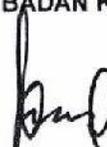
Serilamak, Februari 2020
KEPALA BADAN KEUANGAN


IRWANDI, S.Sos. MM
NIP. 19660913 196603 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KEUANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2019

NO	Uraian	2019	2018
1	Ekuitas Awal	10.399.176.848,40	10.326.219.820,62
2	Surplus/defisit - LO	14.976.131.366,82	9.434.106.267,81
3	R/K PPKD	(12.758.074.189,92)	(9.361.149.240,03)
4	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	-	-
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Pertama kali	-	-
	Koreksi Hutang Tahun Lalu	-	-
	Koreksi Piutang Tahun Lalu	-	-
	Koreksi Pendapatan Tahun ini	-	-
	Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat	-	-
	Mutasi Tambah Aset Tetap	-	-
	Mutasi Kurang Aset	-	(12.000.000,00)
	Mutasi Tambah Aset lainnya	-	12.000.000,00
	Mutasi Asset Ekstra Comp	-	-
	Pendapatan diterima dimuka	-	-
	Mutasi pencatatan Akun Investasi Jangka Panjang ke PPKD	-	-
	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
	Koreksi Penyisihan Piutang Tahun Lalu	-	-
	Koreksi Akumulasi Penyusutan AT-GB Tahun Sebelumnya	-	-
5	Ekuitas Akhir	12.617.234.025,30	10.399.176.848,40

Payakumbuh, Februari 2020
KEPALA BADAN KEUANGAN



IRWANDI, S.Sos.MM
NIP. 19660913 198603 1 009

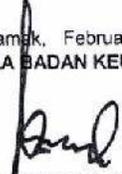
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
BADAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

No. Akun	Uraian	31-Des-19	31-Des-18
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas dan Setara Kas	6.323.359,00	-
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan		
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.323.359,00	
1.1.1.04	Kas di BLUD		
1.1.1.05	Kas Dana Kapitasi JKN		
1.1.3	Piutang Pendapatan	8.210.452.851,00	6.440.833.593,00
1.1.3.01	Piutang Pajak	8.210.452.851,00	6.440.833.593,00
1.1.3.02	Piutang Retribusi		
1.1.3.03	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.3.03.03	Piutang Bagian Laba atas PM pada Perush.Milk Swasta		
1.1.3.04	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.3.04.15	Piutang Lainnya-Kend. R-2 Kades		
1.1.3.04.16	Piutang Lainnya-Bunga Dana Bergulir		
1.1.3.04.17	Piutang Lainnya-Denda Dana Bergulir		
1.1.3.04.18	Piutang Lainnya-Klaim Jasa Layanan ke BPJS		
1.1.3.05	Piutang Lainnya		
1.1.3.05	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
1.1.3.06	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		
1.1.3.07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
1.1.5	Penyisihan Piutang		
1.1.5.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(4.186.483.307,05)	(3.493.408.599,66)
1.1.5.01.01	Penyisihan Piutang Pajak	(4.186.483.307,05)	(3.493.408.599,66)
1.1.5.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.5.01.03	Penyisihan Piut. Hasil Pengel.Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.5.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.7	Persediaan	17.567.575,00	36.350.352,00
	Jumlah Aset Lancar	4.048.880.477,95	2.983.776.345,34
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.1.06	Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.1.06.01	Investasi Non Permanen Lainnya		
	Investasi Non Permanen Lainnya		
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
	Jumlah Investasi Jk.Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	Tanah		
1.3.2	Peralatan dan Mesin	8.910.233.417,00	7.133.301.317,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	6.949.436.731,00	6.626.494.990,00
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	302.444.226,00	302.444.226,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya		
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
	- Gedung		
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(8.088.480.468,65)	(7.159.162.028,94)
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.084.632.222,96)	(6.285.690.764,71)
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(937.094.235,52)	(800.151.274,00)
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan JIJ	(86.754.010,27)	(73.319.990,23)
	Jumlah Aset Tetap	8.073.633.905,35	6.903.078.504,06
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.4	Aset Lain-lain		
1.5.4.01	Aset lain-lain		
1.5.4.01.02	Aset lain-lain (Rusak Berat)	17.216.000,00	17.216.000,00
1.5.4.01.03	Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud)	554.100.000,00	554.100.000,00
1.5.4.01.04	Aset lain-lain (Tanah Sewa)		
1.5.4.01.05	Aset lain-lain (BM Prop.)		
1.5.4.01.06	Aset lain-lain (BM Negara.)		
	Jumlah Aset Lainnya	571.316.000,00	571.316.000,00
	JUMLAH ASET	12.691.810.383,30	10.458.169.849,40
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	74.576.368,00	68.993.001,00
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	6.323.359,00	-
2.2.4	Pendapatan Diterima Dimuka	56.070.433,00	45.766.690,00

30/1/2020

No. Akun	Uraian	31-Des-19	31-Des-18
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.182.566,00	13.226.311,00
2.1.6.04	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.182.566,00	13.226.311,00
2.1.6.04.01	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.182.566,00	13.226.311,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	74.578.368,00	68.993.001,00
3.	EKUITAS		
3.1	EKUITAS		
3.1.1	Ekuitas		
3.1.1.01	Ekuitas		
3.1.1.01.01	Ekuitas	12.617.234.025,30	10.399.176.848,40
	JUMLAH EKUITAS	12.617.234.025,30	10.399.176.848,40
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12.691.810.383,30	10.458.169.849,40

Sarilamak, Februari 2020
KEPALA BADAN KEUANGAN


IRWANDI, S.Sos. MM
NIP. 19660913 198603 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah ;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Keuangan disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA dan DPPA tahun anggaran 2019, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja yang bersangkutan.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2019 Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tagun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada pemerintah Daerah;
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 - 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.3 Prosedur penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.4 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.5. Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- II. Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro;
 - 2.2 Kebijakan Keuangan;
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas akuntansi dan Entitas Pelaporan
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan
 - 4.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.5 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
 - 4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah
- V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

5.2 Laporan Operasional

5.3 Neraca

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah, Badan Keuangan diharapkan mampu memberikan pelayanan administrasi bagi pengelolaan keuangan daerah demi terciptanya administrasi keuangan daerah yang tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Badan Keuangan dalam mengelola anggaran 2019 meliputi hal sebagai berikut :

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2019 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan Penerimaan pajak daerah dengan upaya-upaya penagihan pajak yang lebih intensif.
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan dan penagihan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

2.2.2. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing - masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA dan DPPA Badan Keuangan adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi

biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Badan Keuangan disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2019, Badan Keuangan menetapkan 6 Program yang didukung oleh 64 kegiatan yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

Ke enam (6) Program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja yang cukup baik, dengan persentase keuangan rata-rata sebesar 91,74 %.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Dalam Tahun Anggaran 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Keuangan direncanakan dengan Pendapatan berjumlah Rp. 49.358.821.100,00 dan belanja berjumlah Rp. 31.322.956.076,00 dengan defisit sebesar Rp. 18.035.865.024,00

Untuk mendapat gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Keuangan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Badan Keuangan Tahun 2019

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
- Pajak Daerah	28.500.000.000,00	24.181.111.740,00	84,85
- Retribusi Daerah	89.181.000,00	155.005.500,00	173,81
- Hasil Pengelolaan Kekayaan yg Dipisahkan	2.957.700.000,00	2.675.284.188,00	90,45
- Lain – lain PAD yang Sah	17.811.940.100,00	14.519.647.799,92	81,52
Jumlah Pendapatan	Rp. 49.358.821.100,00	Rp. 41.531.049.227,92	84,14

Untuk pajak daerah secara keseluruhan realisasi mencapai 84,85 % dari target yang ditetapkan dalam APBD 2019. Pajak-pajak yang mempunyai persentase realisasi terbesar adalah Pajak pergeleran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebesar 800 %. Sedangkan pajak daerah dengan persentase paling kecil adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 36,02 %.

3.1.2. Belanja

Total realisasi belanja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 28.772.975.038,00 Jumlah tersebut mencapai 91,86 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 31.322.956.076,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Keuangan Tahun 2019

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA			
a. Belanja Operasi	29.171.208.576,00	26.665.566.797,00	91,41
- Belanja Pegawai	18.480.493.006,00	17.191.173.603,00	93,02
- Belanja Barang dan Jasa	10.690.715.570,00	9.474.393.194,00	88,62
b. Belanja Modal	2.151.747.500,00	2.107.408.241,00	97,94
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.823.147.500,00	1.784.466.500,00	97,88
- Belanja Modal Gedung Bangunan	328.600.000,00	322.941.741,00	98,28
Jumlah Belanja	31.322.956.076,00	28.772.975.038,00	91,86

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 18.480.493.006,00 terealisasi sebesar Rp. 17.191.173.603,00 atau sebesar 93,02 %. Sedangkan pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 10.690.715.570,00 terealisasi sebesar Rp. 9.474.393.194,00 atau sebesar 88,62 %. Untuk belanja modal anggaran sebesar Rp. 2.151.747.500,00 terealisasi sebesar Rp. 2.107.408.241,00 atau sebesar 97,94 %.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.

Sebagian besar kegiatan tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan dan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, kecuali untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Analisa Standar Belanja, realisasi sebesar 70,22 %. Rendahnya penyerapan dana pada kegiatan ini karena tidak terlaksananya analisa standar belanja, namun kegiatan penyusunan SAB terlaksana.
- b. Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah, realisasi sebesar 41,36 %. Rendahnya penyerapan dana pada kegiatan ini karena tidak terlaksananya penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah.
- c. Sistem Informasi Manajemen Asset Daerah, realisasi sebesar 71,56 %. Rendahnya penyerapan dana pada kegiatan ini karena tidak terealisasinya seluruh belanja penunjang kegiatan, namun output kegiatan terlaksana 100%.
- d. Penyusunan KUA/PPAS, realisasi sebesar 58,44 %. Rendahnya penyerapan dana pada kegiatan ini karena tidak terlaksananya sosialisasi dan Bimbingan teknis untuk admin penganggaran, namun output KUA/PPAS terlaksana 100%.
- e. Penyusunan Rancangan Kebijakan Anggaran Daerah, realisasi sebesar 65,77 %. Jasa konsultasi sebagai output kegiatan tercapai 100%, namun realisasi belanja penunjang tidak terealisasi semuanya.
- f. Penyuluhan Pajak Daerah, realisasi sebesar 72,96 %. Untuk realisasi fisik telah terpenuhi 100%, namun rendahnya penyerapan dana pada kegiatan ini karena efisiensi anggaran dan telah menyesuaikan pada kebutuhan.
- g. Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah, realisasi sebesar 72,40 %. Rendahnya penyerapan dana pada kegiatan ini karena proses penyetoran PBB sudah melalui Online, jadi belanja penunjang untuk kegiatan dimaksud tidak terlaksana semuanya.

- h. Kegiatan Pembinaan dan penertiban Pajak Daerah, realisasi sebesar 59,41 %. Rendahnya penyerapan dana pada kegiatan ini karena pelaksanaan sudah diakhir tahun, namun output kegiatan tercapai 100% sebanyak 8 kali.
- i. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, realisasi sebesar 63,79 %. Rendahnya penyerapan dana pada kegiatan ini karena tidak terlaksana Bimbingan Teknis penyusunan laporan keuangan disebabkan bahan pendukung kegiatan dimaksud belum terpenuhi oleh seluruh OPD.

Sedangkan untuk pendapatan, terdapat beberapa pos pajak yang belum mencapai target, yaitu :

a. Pajak Hiburan

Penerimaan untuk pajak ini sebesar Rp. 21.400.000,00 atau 71,33 % dari jumlah yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 30.000000,00.

Rendahnya realisasi Pajak Hiburan ini disebabkan berkurangnya kegiatan hiburan yang membayar, dimana sumbangan Pajak Hiburan hanya berasal dari kegiatan hiburan dari pertandingan motorcross.

b. Pajak Reklame

Penerimaan untuk pajak ini sebesar Rp. 181.905.225,00 atau 33,78 % dari jumlah yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 538.500.000,00.

Rendahnya realisasi Pajak Reklame ini disebabkan karena reklame yang ada sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi. Disamping itu reklame yang memberikan kontribusi dalam membayar pajak adalah reklame papan/billboard dan reklame kain.

c. Pajak Air dan Tanah

Penerimaan untuk pajak ini sebesar Rp. 178.258.285,00 atau 61,47 % dari jumlah yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 290.000.000,00.

Rendahnya realisasi Pajak Air dan Tanah ini disebabkan karena penggunaan air tanah oleh wajib pajak air tanah adalah sesuai dengan jumlah pajak yang dibayarkan.

d. Pajak Sarang Burung Walet

Penerimaan untuk pajak ini sebesar Rp. 0,00 atau 00,00 % dari jumlah yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 500.000,00.

Belum terealisasinya Pajak Sarang Burung Walet disebabkan pada tahun 2018 belum ada laporan produksi sarang burung walet di Kabupaten Lima Puluh Kota.

e. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Penerimaan untuk pajak ini sebesar Rp 1.747.151.684,00 atau 36,02 % dari jumlah yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 4.850.686.635,00.

Rendahnya realisasi PBB-P2 ini disebabkan karena masih banyak ditemui data objek pajak yang harus dilakukan pembaharuan dan pemutakhiran data, kurangnya kerja sama kolektor PBB dan kurangnya kesadaran wajib pajak dan perlunya peningkatan penagihan pajak.

f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan untuk pajak ini sebesar Rp 2.358.147.975,00 atau 58,06 % dari jumlah yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 4.061.331.000,00.

Rendahnya realisasi jenis pajak ini disebabkan karena berkurangnya pengurusan atau proses balik nama atas tanah dan bangunan di tengah-tengah masyarakat.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap asset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan adalah basis akuntansi akrual.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 adalah b tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan hutang.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis

akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembayaran anggaran lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasu penerimaan dan pengeluaran. Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah. Sedangkan untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan akuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip Historis Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar asset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayut hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip laak temu (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Transaksi atau peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode yang digunakan adalah semesteran dan tahunan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

4.3.1. Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

d. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

e. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi

berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut . Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

f. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

g. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

h. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan

pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

i. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

4.5 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

a. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dengan diterapkannya basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas

lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

b. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

d. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Sedangkan belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadinya pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh PPK pada SKPD

4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.6.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh SKPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

4.6.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.6.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.6.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkiraan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
I.	PENDAPATAN		
a.	Pajak Daerah	24.181.111.740,00	20.369.954.187,00
	Jumlah tersebut merupakan :		
-	Pajak Hotel	31.936.000,00	22.538.300,00
	Objek pajak dari jenis pajak ini adalah pemilik hotel/rumah penginapan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Realisasinya mencapai 125,24 % dari target yang ditetapkan.		
-	Pajak Restoran	1.190.118.502,00	912.892.889,00
	Objek pajak dari jenis pajak ini adalah pemilik rumah makan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Realisasinya hanya mencapai 79,14 % dari target yang ditetapkan.		
-	Pajak Hiburan	21.400.000,00	6.900.000,00
	Jenis pajak diatas merupakan kelompok Pajak Hiburan. Objek pajaknya adalah penyelenggara pertunjukan/olahraga/pagelaran seni. Pajak dipungut setiap penyelenggaraan pertunjukan melalui karcis hiburan. Realisasi pajak hiburan hanya mencapai 71,33 % dari target yang ditetapkan.		
-	Pajak Reklame	181.905.225,00	223.691.075,00
	Pajak reklame dikenakan atas pemasangan iklan/reklame, plang nama, merk di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pajak dikenakan per tahun pada objek pajak. Realisasi penerimaan pajak reklame hanya sebesar 33,78 % dari target yang ditetapkan.		
-	Pajak penerangan Jalan PLN	12.193.234.235,00	11.813.595.845,00
-	Pajak Air Tanah	178.258.285,00	208.309.319,00
-	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	6.278.959.834,00	3.777.903.555,00
-	Pajak Bumi dan Bangunan	1.747.151.684,00	1.305.472.079,00
-	Bea Perolehan atas Tanah & Bangunan	2.358.147.975,00	2.098.651.125,00
b.	Pendapatan Retribusi Daerah	155.005.500,00 ✓	139.388.500,00 ✓
	Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah dalam tahun anggaran 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :		
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	155.005.500,00	139.388.500,00

No	Perkiraan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah dikenakan kepada pegawai atas penggunaan barang daerah seperti kendaraan dinas dan rumah dinas.		
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	2.675.284.188,00	2.425.073.057,00
-	Bagian Laba atas penyertaan modal pada BUMD	2.647.783.383,00	2.395.010.106,00
-	Bagian laba penyertaan modal pd perusahaan swasta	-	-
-	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada BPR	27.500.805,00	30.062.951,00
d.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	14.519.647.799,92	11.545.188.637,03
-	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-
-	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	51.053.000,00	37.719.000,00
-	Jasa Giro Kas Daerah	3.047.781.849,00	4.241.006.423,27
-	Jasa Dana Revolving	-	-
-	Kontribusi PDAM Kota Payakumbuh	457.368.624,00	406.595.020,50
-	Pendapatan Bunga Deposito Pada Bank	8.737.361.026,00	5.336.527.820,00
-	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.509.381.457,92	1.220.413.910,26
-	Pendapatan dari Pengembalian	563.473.595,00	185.826.029,00
-	Lain-lain PAD yang sah Lainnya	20.478.248,00	29.437.005,00
-	Pendapatan BOS	-	-
-	Pendapatan Denda Retribusi	132.750.000,00	87.525.000,00
	JUMLAH	41.531.049.227,92 ✓	34.479.604.381,03 ✓

II. BELANJA

1.	Belanja Operasi	26.665.566.797,00 ✓	24.848.221.042,00 ✓
a.	Belanja Pegawai	17.191.173.603,00 ✓	19.245.635.074,00 ✓
-	Gaji dan Tunjangan	13.669.651.333,00	16.434.717.034,00
-	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.412.293.560,00	1.018.819.585,00
-	Biaya Pemungutan PBB	-	-
-	Insentif Pemungutan Pajak	806.737.710,00	731.531.405,00
-	Insentif Pemungutan Retribusi	4.450.000,00	4.459.050,00
-	Uang Lembur	1.298.041.000,00	1.056.108.000,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	9.474.393.194,00 ✓	5.602.585.968,00 ✓
-	Belanja Bahan Pakai Habis	517.401.821,00	379.885.400,00
-	Belanja Bahan/material	28.949.000,00	23.903.000,00
-	Belanja Jasa Kantor	1.015.835.696,00	622.237.729,00
-	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	352.231.181,00	270.020.208,00
-	Belanja Cetak dan Penggandaan	704.798.495,00	646.565.300,00
-	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	14.400.000,00	650.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman	390.263.200,00	309.874.900,00

No	Perkiraan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
-	Belanja pakaian dinas	47.443.000,00	-
-	Belanja Perjalanan Dinas	2.317.331.056,00	1.643.625.948,00
-	Belanja Pemeliharaan	100.615.000,00	95.690.000,00
-	Belanja Jasa Konsultasi	520.247.725,00	12.072.383,00
-	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	799.927.020,00	81.386.100,00
-	Honorarium PNS	2.597.600.000,00	1.355.675.000,00
-	Honorarium Non PNS	67.350.000,00	161.000.000,00
	Jumlah	28.772.975.038,00	24.848.221.042,00

2. Belanja Modal 2.107.408.241,00 268.429.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal dalam tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. BM Peralatan dan Mesin	1.784.466.500,00	234.513.000,00
BM Pengadaan Alat Angkut Darat	265.050.000,00	-
BM Pengadaan Alat Kantor	41.482.500,00	8.850.000,00
BM Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.801.900,00	-
BM Pengadaan Komputer	819.223.100,00	147.163.000,00
BM Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat	399.879.000,00	78.500.000,00
BM Peng.alat studio	223.030.000,00	-
BM Pengadaan Alat Komunikasi	30.000.000,00	-
2. BM Gedung dan Bangunan	322.941.741,00	33.916.000,00
BM Pengadaan Bangunan Tempat Kerja	322.941.741,00	28.916.000,00
BM Pengadaan Kontruksi/Pembangunan Gerbang	-	5.000.000,00

5.2. LAPORAN OPERASIONAL

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH 43.290.364.742,92 35.780.762.114,03

1 Pajak Daerah - LO 25.940.427.255,00 21.672.917.019,00

Jumlah tersebut merupakan pajak daerah yang telah menjadi hak daerah pada tahun 2019, yang terdiri dari :

Pajak hotel	31.936.000,00	21.463.300,00
Pajak restoran	1.190.118.502,00	912.892.889,00
Pajak hiburan	21.400.000,00	6.900.000,00

Pajak reklame	171.601.482,00	216.070.265,00
Pajak Penerangan Jalan	12.193.234.235,00	11.813.595.845,00
Pajak air tanah	178.258.285,00	208.309.319,00
Pajak mineral bukan logam dan batuan	6.278.959.834,00	3.777.903.555,00
Pajak Bumi dan Banguna Pedesaan & Perkotaan	3.516.770.942,00	2.600.813.101,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.358.147.975,00	2.098.651.125,00
2 Retribusi Daerah - LO	155.005.500,00	139.388.500,00

Jumlah tersebut merupakan pendapatan retribusi daerah dalam tahun anggaran 2019, yang terdiri dari :

Retribusi pemakaian kendaraan bermotor	155.005.500,00	139.388.500,00
--	----------------	----------------

3 Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.675.284.188,00	2.425.073.057,00
--	-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam tahun anggaran 2019, yang terdiri dari :

Bagian laba dari penyertaan modal pada Bank Nagari	2.642.906.107,00	2.390.443.278,00
Bagian laba dari penyertaan modal pada BPR	32.378.081,00	31.560.871,00

4 Lain-lain PAD yang Sah	14.519.647.799,92	11.543.383.538,03
---------------------------------	--------------------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan pendapatan asli daerah yang sah dalam tahun anggaran 2019, yang terdiri dari :

Penerimaan Jasa Giro	3.047.781.849,00	4.239.339.953,27
Pendapatan Bunga	8.737.361.026,00	5.336.527.820,00
Tuntutan ganti kerugian daerah	1.509.381.457,92	1.220.413.910,26
Kontribusi PDAM Kota Payakumbuh	457.368.624,00	406.595.020,50
Pendapatan dari pengembalian gaji dan tunjangan	161.984.372,00	163.394.589,00
Pendapatan dari pengembalian kelebihan Belanja Langsung	401.489.223,00	22.431.440,00
Lain-lain PAD yang sah lainnya	20.478.248,00	29.437.005,00
Pendapatan Denda Retribusi	132.750.000,00	87.525.000,00
Penjualan Gedung Bangunan	51.053.000,00	37.719.000,00

BEBAN

BEBAN OPERASI	28.314.233.376,10	26.346.655.846,22
1 Beban Pegawai	17.191.173.603,00	19.245.635.074,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai dalam tahun 2019 dan 2018. Jumlah beban pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

-	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	13.669.651.333,00	16.434.717.034,00
-	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	1.412.293.560,00	1.018.819.585,00
-	Beban Pemungutan PBB - LO	-	-
-	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	806.737.710,00	731.531.405,00
-	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO	4.450.000,00	4.459.050,00
-	Uang lembur - LO	1.298.041.000,00	1.056.108.000,00
2	Beban Barang dan Jasa	9.493.132.226,00	5.569.025.735,00

Jumlah tersebut merupakan beban barang dan jasa dalam tahun anggaran 2019 dan 2018. Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Beban Persediaan	565.133.598,00	421.178.274,00
-------------------------	-----------------------	-----------------------

Merupakan beban persediaan dalam tahun anggaran 2019 dan 2018. Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Sisa Persediaan di Neraca Awal T.A. 2018	36.350.352,00	32.416.374,00
Beban Persediaan	421.178.274,00	403.788.400,00
Beban Persediaan Karcis	-	21.323.852,00
Barang yang diserahkan ke masyarakat	-	-
Sisa di neraca akhir	17.567.575,00	36.350.352,00
Beban persediaan	565.133.598,00	421.178.274,00

Beban Persediaan terdiri dari :

Beban Bahan Pakai Habis	397.275.274,00	397.275.274,00
Beban Alat Tulis Kantor	346.120.177,00	279.090.574,00
Beban Belanja Dokumen/Adm. Tender	-	-
Beban Alat Listrik dan Elektronik	25.992.500,00	17.139.500,00
Beban perangko, materai dan benda pos lain	16.603.500,00	13.108.000,00
Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih	25.416.000,00	10.987.500,00
Beban bahan bakar minyak	88.087.421,00	59.739.700,00
Beban peralatan/perengkapan kantor pakai Habis	875.000,00	345.000,00
Beban Penghargaan	14.650.000,00	-
Beban belanja alat tulis/seminar kit peserta	800.000,00	1.290.000,00

Beban belanja spanduk, bendera merawa	17.640.000,00	15.575.000,00
Beban Persediaan Bahan/Material	28.949.000,00	23.903.000,00
Beban bahan baku bangunan	28.949.000,00	23.903.000,00
Beban Jasa	6.510.052.572,00	3.440.222.013,00
Merupakan total beban jasa selama tahun 2019 yang terdiri dari :		
Beban jasa kantor	195.301.951,00	165.070.749,00
Beban jasa telepon	5.402.963,00	6.424.837,00
Beban jasa air	21.961.110,00	12.415.560,00
Beban jasa listrik	131.088.350,00	116.824.528,00
Beban jasa surat kabar/majalah	7.920.000,00	6.246.000,00
Beban jasa kawat/faksimile/internet	24.929.528,00	23.159.824,00
Beban jasa sertifikat	-	-
Beban jasa pembangunan sistim jaringan	-	-
Beban jasa pengganti transportasi	4.000.000,00	-
Beban perawatan kendaraan bermotor	352.231.181,00	270.020.208,00
Beban jasa service	28.264.546,00	13.952.469,00
Beban belanja penggantian suku cadangan	84.879.545,00	32.351.199,00
Beban belanja bahan bakar minyak dan Pelumas	227.537.340,00	204.192.690,00
Beban belanja pajak kendaraan bermotor	11.549.750,00	19.523.850,00
Beban cetak dan penggandaan	704.798.495,00	625.241.448,00
Beban belanja cetak	305.572.150,00	295.910.048,00
Beban belanja penggandaan	328.218.345,00	277.751.400,00
Beban belanja jilid/cetak non cover	50.758.000,00	51.580.000,00
Beban belanja publikasi	20.250.000,00	-
Beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir	14.400.000,00	650.000,00
Beban belanja sewa gedung/kantor/tempat	-	-
Beban belanja sewa ruang rapat/pertemuan	14.400.000,00	650.000,00
Beban makanan dan minuman	390.263.200,00	309.874.900,00
Beban makan dan minum harian pegawai	237.250.700,00	221.125.400,00
Beban makan dan minum rapat	57.773.500,00	42.322.500,00
Beban makan dan minum tamu	82.904.000,00	46.427.000,00
Beban makan dan minum peserta	12.335.000,00	-

Beban pakaian dinas dan atributnya	47.443.000,00	-
Beban pakaian dinas	47.443.000,00	-
Honorarium Non PNS	1.408.087.725,00	632.303.608,00
Beban jasa tenaga ahli/instruktur/buruh/ Mekanik/mandor	294.650.000,00	104.500.000,00
Beban honorarium pegawai honor/tidak tetap	67.350.000,00	56.500.000,00
Beban jasa kebersihan kantor	149.880.000,00	149.668.400,00
Beban jasa pegawai harian lepas	332.460.000,00	262.440.000,00
Beban jasa konsultasi perencanaan	-	-
Beban jasa konsultasi appraisal	48.830.000,00	-
Beban jasa konsultasi keuangan	78.750.000,00	12.072.383,00
Beban jasa konsultasi pendataan	-	-
Beban jasa Sistim Informasi Komputer	392.667.725,00	-
Beban honorarium buruh/tukang/mechanik/ Mandor	-	3.322.825,00
Beban jasa pengamanan kantor	43.500.000,00	43.800.000,00
Honorarium PNS	3.397.527.020,00	1.437.061.100,00
Beban honorarium pelaksana kegiatan	2.590.700.000,00	1.100.200.000,00
Beban honorarium tim pengadaan barang Dan jasa	3.900.000,00	3.600.000,00
Beban honorarium tenaga ahli/instruktur/ Narasumber	-	-
Beban honorarium PA dan KPA	-	24.900.000,00
Beban honorarium PPK dan Pembantu PPK	-	15.000.000,00
Beban honorarium PPTK dan Pembantu PPTK	-	159.175.000,00
Beban honorarium bendahara,pembantu Bendahara dan bendahara pembantu	-	49.800.000,00
Beban honorarium panitia pemeriksa barang	3.000.000,00	3.000.000,00
Beban belanja sosialisasi	53.229.500,00	21.565.100,00
Beban belanja bimbingan teknis	746.697.520,00	59.821.000,00
Beban Pemeliharaan	100.615.000,00	63.999.500,00
Merupakan total beban pemeliharaan selama tahun 2019 yang terdiri dari :		
Beban pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	62.800.000,00	63.999.500,00
Beban pemeliharaan jaringan / instalasi	16.900.000,00	-
Beban pemeliharaan gedung/ruangan/dinding	20.915.000,00	-

Beban Perjalanan Dinas	2.317.331.056,00	1.643.625.948,00
-------------------------------	-------------------------	-------------------------

Merupakan total beban perjalanan dinas selama tahun 2019 yang terdiri dari :

Beban perjalanan dinas dalam daerah	335.655.000,00	290.645.000,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	1.981.676.056,00	1.352.980.948,00

3. Beban penyusutan	929.318.439,71	620.436.390,77
----------------------------	-----------------------	-----------------------

Merupakan total beban penyusutan pada tahun 2019 yang terdiri dari :

Beban penyusutan peralatan dan mesin	778.941.458,15	487.910.978,14
Beban penyusutan gedung dan bangunan	136.942.961,52	119.091.392,60
Beban penyusutan jalan irigasi dan jaringan	13.434.020,04	13.434.020,03

4. Beban Lain-lain	7.534.400,00	900.000,00
---------------------------	---------------------	-------------------

Asset Ekstracomtable	4.232.500,00	900.000,00
BM tidak dikapital	3.301.900,00	-

5. Beban Penyisihan Piutang	693.074.707,39	910.658.646,45
------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Merupakan total beban penyisihan piutang pajak selama tahun 2019 yang terdiri dari :

Beban penyisihan piutang pajak restoran	-	-
Beban penyisihan piutang PBB P2	693.074.707,39	848.648.718,83
Beban penyisihan piutang reklame	-	2,50

No	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
5.3. NERACA			
5.3.1 AKTIVA			
A. ASET			
I. Aset Lancar			
1. Kas di Bendahara Pengeluaran		5.323.359,00	-
Merupakan kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 ,yang terdiri dari :			
- Hutang PFK		5.323.359,00	-
- UYHD		-	-
2. Kas di Bendahara Penerimaan		-	-

Merupakan kas yang ada pada bendahara penerimaan yang merupakan pajak daerah yang telah diterima Bendahara penerima yang belum disetorkan ke kas daerah. Per 31 Desember 2019 semua penerimaan telah disetorkan Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah, sehingga saldo menjadi nol.

3.	Piutang Pajak Restoran	19.453.800,00	19.453.800,00
-----------	-------------------------------	----------------------	----------------------

Merupakan jumlah Saldo piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 19.453.800,00, karena tidak ada piutang pajak restoran yang dapat ditagih pada tahun 2019.

4.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-
-----------	---	---	---

Merupakan jumlah tagihan pajak mineral bukan logam dan batuan per 31 Desember 2018 dan 2019 yang telah diterbitkan SKP-nya, namun belum disetor ke kas daerah. Tidak terdapat piutang pajak mineral bukan logam dan bantuan per 31 Desember 2019.

5.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	8.186.349.051,00	6.416.729.293,00
-----------	--	-------------------------	-------------------------

Merupakan jumlah tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 dan 2019 yang sampai tanggal 31 Desember belum disetor ke kas daerah. Saldo Piutang PBB per 31 Desember 2018 berjumlah Rp. 6.416.729.293,00 dengan uraian sebagai berikut : (Rincian terlampir)

Piutang per 31 Desember 2019	8.218.137.442,00
- Tahun 2009	84.954.149,00
- Tahun 2010	181.129.095,00
- Tahun 2011	445.834.224,00
- Tahun 2012	531.616.250,00
- Tahun 2013	1.153.648.072,00
- Tahun 2014	571.744.222,00
- Tahun 2015	751.443.643,00
- Tahun 2016	678.208.952,00
- Tahun 2017	694.322.055,00
- Tahun 2018	1.323.828.631,00
- Tahun 2019	1.801.408.149,00
Piutang PBB yang dapat ditagih pada tahun 2019	(31.788.391,00)
- Tahun 2009	(37.000,00)
- Tahun 2010	(-)
- Tahun 2011	(185.000,00)
- Tahun 2012	(185.000,00)
- Tahun 2013	(185.000,00)
- Tahun 2014	(460.107,00)
- Tahun 2015	(1.271.182,00)
- Tahun 2016	(1.205.778,00)
- Tahun 2017	(1.555.661,00)
- Tahun 2018	(26.703.663,00)
Piutang PBB Tahun 2018	1.323.828.631,00
Saldo Piutang PBB per 31 Desember 2019	8.186.349.051,00

6.	Piutang Pajak Reklame	4.650.500,00	4.650.000,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------

Merupakan jumlah tagihan pajak reklame per 31 Desember 2018 yang telah diterbitkan SKP-nya, namun belum disetor ke kas daerah yakni PT. Semen Padang. Piutang per 31 Desember 2018 berjumlah Rp. 4.650.500,00 dengan uraian sebagai berikut :

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2018	4.650.000,00
Piutang Reklame tertagih pada Januari 2019	-

	Piutang Reklame 2019	-	-
	Saldo Piutang Reklame per 31 Desember 2019	4.650.500,00	
7	Piutang Retribusi	-	-
	Merupakan jumlah tagihan Retribusi tahun 2019 yang sampai tanggal 31 Desember belum disetor ke kas daerah. Tidak terdapat Piutang Retribusi per 31 Desember 2019.		
8	Penyisihan Piutang	(4.186.483.307,05)	(3.493.408.599,66)
	Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang. Akun ini pada tahun 2019 berjumlah Rp. 4.186.483.307,05		
9.	Persediaan	17.567.575,00	36.350.352,00
	Merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 yang terdiri dari :		
	- ATK	17.567.575,00	15.026.500,00
	- Barang Cetak	-	-
	- Karcis/benda berharga	-	21.323.852,00
II	Aset Tetap		
1	Peralatan dan Mesin	8.910.233.417,00	7.133.301.317,00
	Merupakan peralatan dan mesin yang dimiliki Badan Keuangan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018. Saldo per 31 Desember 2019 sebesar 8.910.233.417,00. Ada penambahan sebesar Rp. 1.776.932.100,00 dengan uraian sebagai berikut :		
	Mutasi Penambahan :		
	- Belanja Modal tahun 2019	Rp.	1.784.466.500,00
	- Kapitalisasi Barang Jasa	Rp.	-
	Jumlah Mutasi Penambahan	Rp.	1.784.466.500,00
	Mutasi Pengurangan :		
	- Koreksi Asset Ekstracomp 2019	Rp.	4.232.500,00
	- Tidak Dikapitalisir	Rp.	3.301.900,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp.	7.534.400,00
	Jumlah Bersih Mutasi	Rp.	1.776.932.100,00
	Jumlah pembelian / pengadaan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.784.466.500,00 merupakan realisasi Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2019, terdiri dari :		
	- Belanja modal pengadaan mesin hitung/jumlah		1.732.500,00
	- Belanja modal pengadaan AC		32.400.000,00
	- Belanja modal kelengkapan komputer		268.477.000,00
	- Belanja modal pengadaan UPS		121.475.100,00
	- Belanja modal pengadaan computer net book/laptop		240.121.000,00
	- Belanja modal pengadaan printer/ploter		169.900.000,00
	- Belanja modal pengadaan peralatan jaringan		19.250.000,00
	- Belanja modal pengadaan meja kerja pejabat		192.035.000,00

- Belanja modal pengadaan kursi kerja perjabat	77.044.000,00
- Belanja modal pengadaan lemari, lemari arsip filling kabinet	130.800.000,00
- Belanja modal pengadaan mobeleur	995.000,00
- Belanja modal pengadaan vertikal blind	7.350.000,00
- Belanja modal pengadaan alat dapur	4.806.900,00
- Belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda empat	265.050.000,00
- Belanja modal pengadaan proyektor	24.100.000,00
- Belanja modal pengadaan peralatan audio	179.330.000,00
- Belanja modal pengadaan CCTV	19.600.000,00
- Belanja modal pengadaan billboard/baliho/whiteboard	30.000.000,00
Jumlah	1.784.466.500,00

Belanja Modal tidak dikapitalisir Tahun 2019 sebesar Rp. 3.301.900,00,00 merupakan nilai yang tidak masuk kedalam neraca akibat harga dibawah Rp. 300.000 terdiri dari :

- Kasur lipat sebanyak 1 unit	950.000,00
- Gelas set porto 8 buah	280.800,00
- Gelas set vony D/6 2 buah	155.200,00
- Mangkok bola BBR 130 36 buah	99.000,00
- Cangkir set sun flower 4 buah	156.200,00
- Cangkir tadah delima 4 buah	411.000,00
- Piring dinar 8 24 buah	130.800,00
- singa singi napan 2 buah	51.300,00
- napan gagang persegi panjang 2 buah	60.200,00
- sendok makan 878-30 11 buah	205.100,00
- garpu makan 878-30 5 buah	93.250,00
- sendok teh panjang 305 2 buah	17.300,00
- sendok teh GLD SK 0102 2 buah	45.200,00
- toples blw 1000 6 buah	332.700,00
- mioji toppes TKP8S XL 6 buah	268.800,00
Jumlah	3.301.900,00

2. Gedung & Bangunan

6.949.436.731,00 ✓ **6.626.494.990,00** ✓

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2019 dan 2018. Terdapat penambahan nilai gedung dan bangunan pada tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut :

Mutasi Penambahan

- Belanja Modal 2019	Rp.	322.941.741,00
- Kapitalisasi barang jasa	Rp.	-
	Rp.	322.941.741,00

Jumlah Mutasi Penambahan		
Mutasi Pengurangan	Rp.	-
- Penghapusan asset	Rp.	-
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp.	-

Jumlah pengadaan asset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 322.941.741,00 merupakan realisasi Belanja modal Gedung dan Bangunan pengadaan bangunan tempat kerja yakni gudang arsip dan pos jaga.

3. Jalan Irigasi dan Jaringan 302.444.226,00 302.444.226,00

Akun ini per 31 Desember 2018 mempunyai saldo sebesar Rp. 302.444.226,00 Tidak terdapat penambahan pada tahun 2019 karena tidak ada belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan dan tidak ada reklas masuk dan reklas keluar pada tahun 2019.

Saldo awal tahun 2019		302.444.226,00
Mutasi Tambah		-
BM JIJ Tahun 2019		-
Kapitalisasi Barang Jasa		-
Mutasi Kurang		-
Saldo per 31 Desember 2019		302.444.226,00

4. Aset Tetap Lainnya 0 0

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya tahun 2019 dan 2018 bernilai nol.

5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (8.008.480.468,65) (7.159.162.028,94)

Akun ini merupakan akumulasi penyusutan semua aset tetap per 31 Desember 2019, yang terdiri dari :

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.064.632.222,86)	(6.285.690.764,71)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(937.094.235,52)	(800.151.274,00)
Akumulasi Penyusutan JIJ	(86.754.010,27)	(73.319.990,23)

IV. Aset Lainnya 571.316.000,00 571.316.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset lainnya yang dikuasai oleh Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2019 dan 2018.

Saldo awal tahun 2019	571.316.000,00	559.316.000,00
Mutasi Tambah	-	-
Mutasi Kurang	-	-
Reklas Masuk	-	12.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	571.316.000,00	571.316.000,00

Saldo Asset lainnya terdiri dari :

- Asset lain-lain Rusak Berat	17.216.000,00
- Asset lain-lain Software	554.100.000,00

Jumlah 571.316.000,00

5.3.2. KEWAJIBAN

A. KEWAJIBAN

I. Kewajiban Jangka Pendek

74.576.358,00 ✓ 58.993.001,00

1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

5.323.359,00 -

Merupakan potongan pajak yang sudah dipungut Bendaharawan pengeluaran, tetapi sampai tanggal 31 Desember belum disetorkan ke Kas Negara. Pada tanggal 31 Desember 2018 akun ini bersaldo nol, sedangkan pada tahun 2019 mempunyai saldo sebesar Rp. 5.323.359,00

2 Pendapatan diterima dimuka

56.070.433,00 45.766.690,00

Merupakan pendapatan pajak reklame yang telah masuk ke Kas Daerah untuk periode tertentu, namun masa pajaknya per 31 desember 2019 belum habis.

3 Utang Jangka Pendek Lainnya

13.182.566,00 13.226.311,00

Merupakan saldo tagihan atau hutang yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari satu tahun per 31 Desember 2019 dan 2018, terdiri dari :

- Tagihan listrik bulan Desember 2019	10.487.171,00	10.743.912,00
- Tagihan internet dan telpon Desember bulan 2019	2.488.630,00	2.482.399,00
- Tagihan PDAM Desember 2019	206.765	-

B. EKUITAS

12.617.234.-25,30 ✓ 10.399.176.848,40 ✓

Jumlah tersebut merupakan nilai Ekuitas pada Badan Keuangan per-31 Desember 2019 dan 2018.

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasi dengan Neraca tentang kenaikan dan penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1 Ekuitas awal

10.399.176.848,40 ✓ 10.326.219.820,62 ✓

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih yang dimiliki dan dikuasai oleh Badan Keuangan periode 31 Desember 2019 dan 2018 setelah dikurangi dengan kewajiban atau akumulasi penyusutan. Rincian Ekuitas Awal tersebut antara lain :

- Jumlah Asset Lancar	4.046.860.477,95
- Jumlah Asset Tetap	8.073.633.905,35
- Jumlah Asset Lainnya	571.316.000,00
Jumlah Asset	12.691.810.383,30
- Jumlah Kewajiban	74.576.358,00

Jumlah Ekuitas

12.617.234.025,30 ✓ 10.399.176.848,40 ✓

Jumlah Asset Lancar sebesar Rp. 4.046.860.477,95 dan 2.983.775.345,34 merupakan nilai persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018.

Jumlah Asset tetap sebesar Rp. 8.073.633.905,35 dan 6.903.078.504,06 terdiri dari :

- Peralatan dan Mesin	8.910.233.417,00	7.133.301.317,00
- Gedung dan Bangunan	6.949.436.731,00	6.626.494.990,00
- Jalan, irigasi dan Jaringan	302.444.226,00	302.444.226,00
Jumlah	8.073.633.905,35	6.903.078.504,06

Nilai Asset lainnya sebesar Rp. 571.316.000,00 dan Rp. 571.316.000,00 terdiri dari :

- Asset lain-lain Rusak Berat	17.216.000,00	17.216.000,00
- Asset lain-lain tidak berwujud (Software)	554.100.000,00	554.100.000,00
Jumlah	571.316.000,00	571.316.000,00

Nilai Kewajiban sebesar Rp. 74.576.358,00 dan 58.993.001,00 terdiri dari :

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.323.359,00	-
- Pendapatan diterima dimuka	56.070.433,00	45.766.690,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya	13.182.566,00	13.226.311,00
Jumlah	74.576.358,00	58.993.001,00

5.4.2 Surplus / Defisit - LO **14.976.131.366,82** **9.434.106.270,81**

Merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus / defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Rincian Surplus / Defisit-LO Badan Keuangan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 berupa :

- Pendapatan-LO	43.290.364.742,92	35.782.567.213,03
- Beban-LO	28.314.233.376,10	26.346.655.846,22
Jumlah	14.976.131.366,82	9.435.911.366,81

5.4.3 R/K PPKD **(12.758.074.189,92)** **(9.361.149.243,03)**

Merupakan selisih antara R/K (M) Pendapatan dan R/K (K) Pengeluaran Tahun 2019 dan 2018.

R/K PPKD (Pengeluaran) merupakan Belanja Defenitif ditambah Kas Pada Bendahara Pengeluaran dikurangi PFK.

5.4.4 Dampak kumultaif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar **-** **-**

- Mutasi Kurang Asset	-	(12.000.000,00)
-----------------------	---	-----------------

Merupakan mutasi kurang asset pada Asset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2019.

- Mutasi Tambah Asset lainnya

12.000.000,00

Merupakan jumlah koreksi peralatan mesin tahun 2019.

5.4.5 Ekuitas Akhir

12.617.234.025,30 ✓

10.399.176.848,40 ✓

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir Tahun 2019 dan 2018.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kedudukan

Badan Keuangan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dalam urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, organisasi Badan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub. Bagian Keuangan
 3. Sub. Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahi :
 1. Sub. Bidang I
 2. Sub. Bidang II
 3. Sub. Bidang III
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi :
 1. Sub. Bidang I
 2. Sub. Bidang II
 3. Sub. Bidang III
- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi :
 1. Sub. Bidang I
 2. Sub. Bidang II
 3. Sub. Bidang III
- f. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahi :
 1. Sub. Bidang I
 2. Sub. Bidang II
 3. Sub. Bidang III
- g. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi :
 1. Sub. Bidang I
 2. Sub. Bidang II
 3. Sub. Bidang III
- h. Bidang Akuntansi, membawahi

1. Sub. Bidang I
2. Sub. Bidang II
3. Sub. Bidang III

6.3 Aspek Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah, Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai peranan sangat strategis dalam perumusan kebijakan keuangan daerah dan penatausahaan keuangan daerah.

Jumlah Pegawai Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota keadaan Desember 2019 sebanyak 79 orang PNS, 2 orang PTT dan 24 orang pegawai harian.

BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing. Untuk pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan tersebut maka pada akhir tahun anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan. Badan Keuangan sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan realisasi penggunaan anggaran sebagai berikut :

Total realisasi belanja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam tahun anggaran 2019 tercatat sebesar Rp 31.322.956.076,00 atau 91,86 % dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 28.772.975.038,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Operasi	29.171.208.576,00	26.665.566.797,00	91,41
Belanja Pegawai	18.480.493.006,00	17.191.173.603,00	93,02
Belanja Barang dan Jasa	10.690.715.570,00	9.474.393.194,00	88,62
Belanja Modal	2.151.747.500,00	2.107.408.241,00	97,94
Belanja Modal Tanah			
Belanja Peralatan & Mesin	1.823.147.500,00	1.784.466.500,00	97,88
BM Gedung & Bangunan	328.600.000,00	322.941.741,00	98,28
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
Jumlah	31.322.956.076,00	28.772.975.038,00	91,86

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target dan indikator kinerja yang direncanakan.

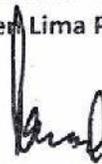
LAMPIRAN 1

(Hutang Jangka Pendek)

**DAFTAR : HUTANG JANGKA PENDEK
BADAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

NO.	JENIS TAGIHAN	JUMLAH
1	Tagihan listrik bulan Desember 2019	10.487.171,00
2	Tagihan telepon bulan Desember 2019	651.096,00
3	Tagihan internet bulan Desember 2019	1.837.534,00
4	Tagihan air bulan Desember 2019	206.765,00
	Jumlah	13.182.566,00

Sarilamak, Februari 2020
**Kepala Badan Keuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota**



**IRWANDI, S.Sos. MM
NIP. 19660913 198603 1 009**

LAMPIRAN 2

(Rekapitulasi Piutang)

**REKAPITULASI PIUTANG BADAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

NO.	URAIAN	SALDO AWAL PIUTANG (2018)	MUTASI TAHUN 2019		SALDO PER 31 DESEMBER 2019
			MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	
I.	Piutang Pajak	6.440.833.093,00	1.801.408.149,00	31.788.391,00	8.210.452.851,00
1	Piutang Pajak Restoran	19.453.800,00	-	-	19.453.800,00
2	Pajak Bumi dan Bangunan a. Piutang PBB Tahun 2019 b. Piutang PBB yang dapat ditagih tahun 2019	6.416.729.293,00	1.801.408.149,00 1.801.408.149,00	31.788.391,00 31.788.391,00	8.186.349.051,00
3	Pajak Reklame a. Piutang Pajak Reklame Tahun 2019 b. Piutang Pajak Reklame yang dapat ditagih tahun 2019	4.650.000,00	-	-	4.650.000,00
	Jumlah Piutang	6.440.833.093,00	1.801.408.149,00	31.788.391,00	8.210.452.851,00

Sarililamak, Februari 2020

Kepala Badan Keuangan
Kabupaten Aima Puluh Kota



IRWANDI, S.Sos. MM
NIP. 19660913 198603 1 009

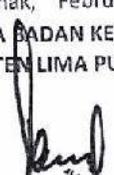
LAMPIRAN 3

(Piutang PBB-P2 Tertagih)

DAFTAR : PIUTANG PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN
TERTAGIH TAHUN 2019

NO.	TAHUN PAJAK	JUMLAH PIUTANG PBB TERTAGIH
1	2009	37.000,00
2	2010	-
3	2011	185.000,00
4	2012	185.000,00
5	2013	185.000,00
6	2014	460.107,00
7	2015	1.271.182,00
8	2016	1.205.778,00
9	2017	1.555.661,00
10	2018	26.703.663,00
	JUMLAH	31.788.391,00

Sarilamak, Februari 2020
KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


IRWANDI, S.Sos. MM
Nip. 19660913 198603 1 009

LAMPIRAN 4

(Rincian Piutang PBB-P2)

**RINCIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
PER 31 DESEMBER 2019**

NO	TAHUN PAJAK	JUMLAH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2018	PIUTANG TERTAGIH TAHUN 2019	JUMLAH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
1	2009	84.954.149,00	37.000,00	84.917.149,00
2	2010	181.129.095,00	-	181.129.095,00
3	2011	445.834.224,00	185.000,00	445.649.224,00
4	2012	531.616.250,00	185.000,00	531.431.250,00
5	2013	1.153.648.072,00	185.000,00	1.153.463.072,00
6	2014	571.744.222,00	460.107,00	571.284.115,00
7	2015	751.443.643,00	1.271.182,00	750.172.461,00
8	2016	678.208.952,00	1.205.778,00	677.003.174,00
9	2017	694.322.055,00	1.555.661,00	692.766.394,00
10	2018	1.323.828.631,00	26.703.663,00	1.297.124.968,00
11	2019	1.801.408.149,00	-	1.801.408.149,00
	JUMLAH	8.218.137.442,00	31.788.391,00	8.186.349.051,00

Sarilamak, Februari 2020
**KEPALA BADAN KEUANGAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



IRWANDI, S.Sos. MM
 NIP. 19660913 198603 1 009

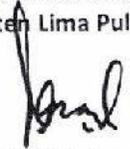
LAMPIRAN 5

(Perhitungan Penyisihan Piutang)

**PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG
BADAN KEUANGAN
SAMPAI TAHUN 2019**

No	URAIAN		
1.	Pajak Restoran		
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran		
	• 2008	= 100% x Rp.	19.453.800,00
		= Rp	19.453.800,00
		Jumlah	= Rp 19.453.800,00
2.	Piutang PBB P₂		
	Penyisihan Piutang PBB P ₂		
	• 2009	= 100% x Rp.	84.917.149,00
	• 2010	= 100% x Rp.	181.129.095,00
	• 2011	= 100% x Rp.	445.649.224,00
	• 2012	= 100% x Rp.	531.431.250,00
	• 2013	= 100% x Rp.	1.153.463.072,00
	• 2014	= 100% x Rp.	571.284.115,00
	• 2015	= 50% x Rp.	750.172.461,00
	• 2016	= 50% x Rp.	677.003.174,00
	• 2017	= 50% x Rp.	692.766.394,00
	• 2018	= 10% x Rp.	1.297.124.968,00
	• 2019	= 0,5% x	1.801.408.149,00
			JUMLAH
3.	Piutang Pajak Reklame		
	• 2018	= 10% x Rp.	4.650.500,00
			JUMLAH
Jumlah Penyisihan Piutang			Rp 4.186.483.307,05

Sarilamak, Februari 2020
Kepala Badan Keuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota


IRWANDI, S.Sos.MM
NIP. 19660913 198603 1 009

LAMPIRAN 6

(Pendapatan Diterima Dimuka)

REKAP DATA PAJAK REKLAME TAHUN 2019

NO SKPD	TANGGAL	MASA/BERLAKU	REKANAN/ALAMAT	JENIS REKLAME	UKURAN	JUMLAH	ALAMAT/LETAK REKLAME	JUMLAH PAJAK (Rp)	PENDAPATAN LO TAHUN 2019 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2019 (Rp)
01	15/01/2019	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019	PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Jl. Khairuddin Nasution KM 12 Maharatu Marpoyan Damar Pekanbaru Riau	Billboard (Indomile) Perpanjangan	4 m x 0,9 m x 1 Sisi	1 Unit	Nag. Koto Tengah Batu Hampa Kec. Akabiluru	270,000	270,000	270,000
02	01/02/2019	1 Februari 2019 s/d 1 Februari 2020	Projeka Adv Jln. Raya Jambu Air No. 32 Agam	Shop Sign (Gudang Garam)	1 m x 2 m x 2 sisi	1 Unit	Toko ING (Limbanang) Kec. Suliki	300,000	275,000	25,000
03	01/02/2019	1 Februari 2019 s/d 1 Februari 2020	Projeka Adv Jln. Raya Jambu Air No. 32 Bukittinggi	Shop Sign (Gudang Garam) Perpanjangan	1 m x 2 m x 2 sisi	2 Unit	Toko Alco & Zan-zam Sarilamak Kec. Harau	600,000	550,000	50,000
04	01/02/2019	1 Februari 2019 s/d 1 Februari 2020	Projeka Adv Jln. Raya Jambu Air No. 32 Bukittinggi	Shop Sign (Gudang Garam) Perpanjangan	1 m x 2 m x 2 sisi	4 Unit	Toko RM Ceil, ZP, Adello & Salwa Lubuk Batangku Kec. Harau	1,200,000	1,100,000	100,000
05	01/02/2019	1 Februari 2019 s/d 1 Februari 2020	Projeka Adv Jln. Raya Jambu Air No. 32 Bukittinggi	Shop Sign (Gudang Garam) Perpanjangan	1 m x 2 m x 2 sisi	1 Unit	Toko H. Rul Kec. Pangkalan	300,000	275,000	25,000
06	07/02/2019	7 Februari 2019 s/d 6 Februari 2020	Entra Homestay Jl. Sarasah Tanggo Taratak Kecamatan Harau	Papan	1 m x 1 m x 1 sisi	1 Unit	Simp. 3 Sarilamak Kec. Harau	75,000	68,750	6,250
07	15/02/2019	8 Februari 2019 s/d 7 Februari 2020	CV. Karya Abang Adek Perkasa Jl. Jhoni Anwar No. 3 A Lapsai Padang	Shopsight (Axi dan XL)	1 m x 2 m x 1 sisi	2 Unit	Kedai V3 Cell dan A2 Cell Nag Koto Tuo Kec. Harau	300,000	275,000	25,000
08	13/03/2019	4 Maret 2019 s/d April 2019	PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jambu Air No. 32 Kp. Tj Medan Jambu Aia, Bukittinggi	Vertikal Barner (Sampurna)	1,25 m x 1 m	45 Unit	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	1,687,500	1,687,500	-
09	13/03/2019	13 Maret 2019 s/d 12 April 2019	CV. Advi Multi Kreasi Jl. Pasar Mudiak No. 86 RT 002 RW 001 Pasa Gadang Padang	Vertikal Barner Spanduk (Gudang Garam POSM)	1 m x 3 m 1 m x 5 m	15 Unit 6 Unit	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	1,125,000	1,125,000	-
10	18/03/2019	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019	CV. Advi Multi Kreasi Jl. Pasar Mudiak No. 86 RT 002 RW 001 Pasa Gadang Padang	Shopsight (Gudang Garam)	1 m x 2 m x 2 sisi	4 Unit	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	1,200,000	1,200,000	-
11	02/04/2019	1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2020	PT. Unico Sentral Distribusi Jl. By Pass KM 17 Padang	Shopsight (Merk IKAD)	1,5 m x 4,5 m x 2 Sisi	1 Unit	Toko Amanag Balai Talang Kec. Guguk	1,431,000	1,311,750	119,250
12	02/04/2019	1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2020	PT. Unico Sentral Distribusi Jl. By Pass KM 17 Padang	Shopsight (Merk IKAD)	1,25 m x 3,75 m x 2 Sisi	1 Unit	Toko Amanah Kuranji Kec. Guguk	993,750	910,938	82,813

NO KPD	TANGGAL	MASW/BERLAKU	REKANAN/ALAMAT	JENIS REKLAME	UKURAN	JUMLAH	ALAMAT/LETAK REKLAME	JUMLAH PAJAK (Rp)	PENDAPATAN 10 TAHUN 2019 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMULIA TAHUN 2019 (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bukittinggi							
13	02/04/2019	1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2020	PT. Unico Sentral Distribusi Jl. By Pass KM 17 Padang Bukittinggi	Shopsight (Merk IKAD)	1,5 m x 4,5 m x 2 Sisi	1 Unit	Toko Azizah Tj Pati Kec. Harau	1,431,000	1,311,750	119,250
14	02/04/2019	1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2020	PT. Unico Sentral Distribusi Jl. By Pass KM 17 Padang Bukittinggi	Shopsight (Merk IKAD)	1,5 m x 4,5 m x 2 Sisi	1 Unit	Toko H Nian Kubang Kec. Guguk	1,073,250	983,913	89,438
15	04/04/2019	2 Juli 2019 s/d 2 Oktober 2019	PT. Emil Printing Padang	Sticker/ Sunscreen (Indosat)	1 m x 5 m x 1 Sisi	31 Unit	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	2,325,000	2,325,000	-
16	04/04/2019	1 April 2019 s/d 1 Juli 2019	PT. Emil Printing Padang	Sticker/ Sunscreen (Indosat)	1 m x 5 m x 1 Sisi	24 Unit	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	1,800,000	1,800,000	-
17	10/04/2019	20 Maret 2019 s/d 19 Maret 2020	PT. KT & G (Korea Tomorrow & Global) Jl. By Pass KM 21 Batipuah	Baliho (Merk Esse) Perpanjangan	4 m x 6 m x 1 Sisi	1 Unit	Sarilamak Kec. Harau	2,250,000	1,687,500	562,500
18	18/04/2019	18 April 2019 s/d 17 April 2020	PT. Hika Megah Jaya Media Jl. Ngagelrejo VI Lebar No.10 RT 010 RW 002 Kota Surabaya	Billboard (Bogasari)	1 m x 3 m x 1 Sisi	1 Unit	Toko Naya Depan SPBU Sarilamak Kec Harau	225,000	150,000	75,000
19	24/04/2019	1 April 2019 s/d 31 Maret 2020	CV. Kreasi Citra Media Jl. Soekarno Hatta No 79 Garegeh Bukittinggi	Baliho (Sampoerna) Perpanjangan	4 m x 6 m x 1 Sisi	1 Unit	Jl. Raya Tanjung Pati dekat Dishub Kec. Harau	2,250,000	1,687,500	562,500
20	24/04/2019	1 April 2019 s/d 31 Maret 2020	CV. Kreasi Citra Media Jl. Soekarno Hatta No 79 Garegeh Bukittinggi	Baliho (Sampoerna) Perpanjangan	4 m x 6 m x 1 Sisi	1 Unit	Pasar Sarilamak Kec. Harau	2,250,000	1,687,500	562,500
21	24/04/2019	1 April 2019 s/d 31 Maret 2020	CV. Kreasi Citra Media Jl. Soekarno Hatta No 79 Garegeh Bukittinggi	Baliho (Sampoerna) Perpanjangan	4 m x 6 m x 1 Sisi	1 Unit	Jl. Raya Simpang Pliadang Kec. Akabllu	2,250,000	1,687,500	562,500
22	24/04/2019	1 April 2019 s/d 31 Maret 2020	CV. Kreasi Citra Media Jl. Soekarno Hatta No 79 Garegeh Bukittinggi	Baliho (Sampoerna) Perpanjangan	4 m x 6 m x 1 Sisi	1 Unit	Pasar Dandung-2 Simpang Mungka Kec. Guguk	2,250,000	1,687,500	562,500
23	24/04/2019	1 April 2019 s/d 31 Maret 2020	CV. Kreasi Citra Media Jl. Soekarno Hatta No 79 Garegeh Bukittinggi	Baliho (Sampoerna) Perpanjangan	4 m x 6 m x 1 Sisi	1 Unit	RM. Mekan Mak Nawi Lbk. Bangku Kec. Harau	2,250,000	1,687,500	562,500
24	26/04/2019	15 April 2019 s/d 14 April 2020	PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jambu Air No. 32 Kp. Tj Medan Jambu Aia, Bukittinggi	Baliho (Merk Sampoerna) Perpanjangan	4 m x 6 m 4 m x 6 m	1 Unit 2 Unit	Koto Baru Smgg, Pakan Raba dan SPBU Pangkalan	7,500,000	5,625,000	1,875,000
25	08/05/2019	4 Mei 2019 s/d 3 Juni 2019	CV. Advi Multi Kreasi	Vertikal Barner	1 m x 3 m	25 Unit	Tersebar di Kab. Lima Puluh	1,125,000	1,125,000	-

NO	NO SRPD	TANGGAL	MASA/BERLAKU	REKANAN/ALAMAT	JENIS REKLAME	UKURAN	JUMLAH	ALAMAT/LETAK REKLAME	JUMLAH PAJAK (Rp)	PENDAPATAN LO TAHAUN 2019 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jl. Pasar Mudiak No. 86 RT 002 RW 001 Pasa Gadang Padang	(Merk Gudang garam)			Kota			
26		13/05/2019	1 Mei 2019 s/d 4 Mei 2019	Projeka Adv Jln. Raya Jambu Air No. 32 Bukittinggi	Spanduk (Merk Gudang garam)	1 m x 5 m	1 Unit	Jl. Batang Tabik Kecamatan Luak	50,000	50,000	
27		13/05/2019	1 Mei 2019 s/d 4 Mei 2019	Projeka Adv Jln. Raya Jambu Air No. 32 Bukittinggi	Spanduk (Merk Gudang garam)	1 m x 5 m	1 Unit	Simpang Lampasi Kecamatan Payakumbuh	75,000	75,000	
28		13/05/2019	1 Mei 2019 s/d 4 Mei 2019	Projeka Adv Jln. Raya Jambu Air No. 32 Bukittinggi	Spanduk (Merk Gudang garam)	1 m x 5 m	3 Unit	Pasar Sarilamak, Jembatan Tj. Pati & Batas Kota Pyk	225,000	225,000	
29		15/05/2019	7 Mei 2019 s/d 6 Mei 2020	CV. Karya Abang Adek Perkasa Jl. Jhoni Anwar No. 3 A Lapal Padang	Shopsign (Panel PT XL Axiata)	2 m x 1 m	2 Unit	Kedal Habib Cell dan Raja Cell Taeh Baruah Kec. Payakumbuh	300,000	200,000	100,000
30		16/05/2019	1 April 2019 s/d 31 Maret 2020	PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jambu Air No. 32 Kp. Tj Medan Jambu Ala, Bukittinggi	Shopsign (Merk Sampoerna)	1 m x 2 m x 2 Sisi 1 m x 6 m x 1 Sisi	35 Unit 1 Unit	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	10,950,000	8,212,500	2,737,500
31		17/06/2019	6 Juni 2018 s/d 5 Juli 2018	PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jambu Air No. 32 Kp. Tj Medan Jambu Ala, Bukittinggi	Sunscreen & Stiker (Sampoerna)	1 m x 2 m 1 m x 3 m 1 m x 4 m 40 cm x 40 cm	10 Unit 15 Unit 5 Unit 300 unit	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	1,425,000	1,425,000	
32		17/06/2019	15 Maret 2019 s/d 14 Maret 2020	CV. Kreasi Citra Media Jl. Soekarno Hatta No 79 Garegeh Bukittinggi	Balho (PT. Djarum)	4 m x 6 m x 1 Sisi	1 Unit	Simpang Kapur IX-Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru	2,289,600	1,508,000	381,600
33		6/19/2019	17 Juni 2019 s/s 16 Juni 2020	Projeka Adv Jln. Raya Jambu Air No. 32 Bukittinggi	Shopsign (Gudang Garam)	1 m x 2 m x 2 Sisi	1 Unit	Toko Nan Gando Ketinggian Nagari Sarilamak Kec. Harau	300,000	150,000	150,000
34		6/19/2019	17 Juni 2019 s/s 16 Juni 2020	Projeka Adv Jln. Raya Jambu Air No. 32 Bukittinggi	Shopsign (Gudang Garam)	1 m x 2 m x 2 Sisi	1 Unit	Toko Gading Lubuak Bangku Nagari Sarilamak Kec. Harau	300,000	150,000	150,000
35		6/24/2019	1 Mei 2019 s/d 30 Mei 2019	PT. Njorono Tobacco Internasional Jl. By Pas KM 7 Kelurahan-Pisang Padang	Spanduk Layar Toko: (Glass Mild)	1 m x 0,75 m	100 Unit	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	1,147,500	1,147,500	
36		16/07/2019	8 Juni 2019 s/d 7 Agustus 2019	PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jambu Air No. 32 Kp. Tj Medan Jambu Ala, Bukittinggi	Vertikal Baner (Sampoerna)	1 m x 3 m	60 Unit	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	2,700,000	2,700,000	

NO	NO SKPD	TANGGAL	MASA/BERLAKU	REKAMAN/ALAMAT	JENIS REKLAME	UKURAN	JUMLAH	ALAMAT/LETAK REKLAME	JUMLAH PAJAK (Rp)	PENDAPATAN LO TAHUN 2019 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37		30/07/2019	29 Juli 2019 s/d 29 Juli 2020	CV. Advi Multi Kreasi Jl. Pasar Mudlak No. 86 RT 002 RW 001 Pasa Gadang Padang	Billboard/Papan (Gudang Garam)	1 m x 2 m x 2 Sisi	11 Unit	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	3,300,000	1,375,000	1,925,000
38		09/08/2019	22 Juli 2019 s/d 21 Agustus 2019	PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jambu Air No. 32 Kp. Tj Medan Jambu Ala, Bukittinggi	Shopsign/ Sunscreen (Merk Sampoerna)	0.7 m x 3 m x 1 Sisi 0.7 m x 4 m x 1 Sisi 1 m x 3 m x 1 Sisi 1 m x 4 m x 1 Sisi 40 cm x 40 cm	12 Unit 15 Unit 20 Unit 20 Unit 500 Unit	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	3,148,000	3,148,000	-
39		14/08/2019	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019	Multi Mediatama Adv Jl. Puma No 3 Tunggul Hitam Padang	Shopsign (Class Mild) <i>Perpanjangan</i>	1 m x 2 m x 2 Sisi	21 Unit	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	7,182,000	7,182,000	-
40		16/08/2019	16 Agustus 2019 s/d 15 Agustus 2020	CV. Kreasi Citra Media Jl. Soekarno Hatta No 79 Garegeh Bukittinggi	Billboard (Class Mild)	5 m x 10 m x 1 Sisi	1 Unit	Jl. Raya Batas Kota Piliadang Kec. Akabilluru	6,500,000	2,166,667	4,333,333
41		20/08/2019	20 Juli 2019 s/d 19 Juli 2020	PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Jl. Kharuddin Nasution KM 12 Maharatu Marapoyan Dama Pekanbaru	Baiho	5 m x 10 m x 2 Sisi	1 Unit	RM. Terang Bulan Lubuk Bangku Kec. Harau	10,000,000	4,166,667	5,833,333
42		26/08/2019	31 Agustus 2019 s/d 30 Agustus 2020	CV. Cakra Multi Niaga Jl. Bakti IV No 12 Alai Parak Kopi Padang	Sigh Shop (Merk Axis)	1 m x 2 m x 1 Sisi	1 Unit	Aini Cel Sarilamak Kec. Harau	150,000	50,000	100,000
43		26/08/2019	31 Agustus 2019 s/d 30 Agustus 2020	CV. Cakra Multi Niaga Jl. Bakti IV No 12 Alai Parak Kopi Padang	Sigh Shop (Merk XL)	1 m x 3 m x 1 Sisi	1 Unit	My Cell Sarilamak Kec. Harau	225,000	75,000	150,000
44		26/08/2019	31 Agustus 2019 s/d 30 Agustus 2020	CV. Cakra Multi Niaga Jl. Bakti IV No 12 Alai Parak Kopi Padang	Sigh Shop (Merk XL)	1 m x 5 m x 1 Sisi	1 Unit	Ribon Cell Tj. Pati Kec. Harau	375,000	125,000	250,000
45		05/09/2019	10 September 2019 s/d 9 September 2020	Cakrawala Adv. Jl. Cendrawasih No 28 Sukajadi Pekanbaru	Shop Sight (Merk) (Merek Dunlop) <i>Perpanjangan</i>	14 m x 2,4 m x 1 Sisi 1,8 m x 3,1 m x 2 Sisi	1 Unit 1 Unit	Toko Sinar Jaya Dandung2 Kec. Guguk	3,357,000	1,119,000	2,238,000
46		09/09/2019	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2020	PT. BRI Persero Kanca Payakumbuh Jl. Jendral Sudirman Payakumbuh	Neonbox			Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	8,100,000	4,050,000	4,050,000
47		09/09/2019	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2020	PT. BNI Persero Kanca Payakumbuh Jl. Sukarno Hatta Payakumbuh	Neonbox			Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	1,040,000	520,000	520,000
48		09/09/2019	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2020	Bank Nagari Kanca Payakumbuh Jl. Jendral Sudirman Payakumbuh	Neonbox			Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	1,237,500	618,750	618,750

NO	NO SKPD	TANGGAL	MASA/BERLAKU	REKANAN/ALAMAT	JENIS REKLAME	UKURAN	JUMLAH	ALAMAT/LETAK REKLAME	JUMLAH PAJAK (Rp)	PENDAPATAN LO TAHUN 2019 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMIJUKA TAHUN 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	49	09/09/2019	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2020	Bank Nagari Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Pekanbaru	Neonbox			Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	562,500	281,250	281,250
	50	19/09/2019	14 September 2019 s/d 30 Oktober 2019	PT. Manunggal Jaya Tobacco Jl. Raya Demak Kudus KM 7 RT 003 RW 004 Trengguli Kec. Wonosalam Demak	Vertikal Barner (Merk Chief)	3 m x 0.9 m x 1 Sisi	15 Unit	Tanjung Pati dan Kelok 9 Kecamatan Harau	607,500	607,500	-
	51	02/10/2019	28 September 2019 s/d 27 Oktober 2019	PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jambu Air No. 32 Kp. TJ Medan Jambu Ala, Bukittinggi	Vertikal Barner (Merk Sampoerna)	1 m x 3 m x 1 Sisi	10 Unit	Tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota	450,000	450,000	-
	52	22/10/2019	21 Oktober 2019 s/d 20 Oktober 2020	Sonic Advertising Padang	Billboard Papan (Produk Nippon Palm)	2 m x 2 m x 2 Sisi 4 m x 2 m x 1 Sisi	1 Unit 1 Unit	Jaya Bangunan Sarilamak Kec. Harau	1,200,000	200,000	1,000,000
	53	28/10/2019	22 Oktober 2019 s/d 23 Oktober 2019	Cv. Ny. Media Adv Jl. Pallinggam II No 8 RT 003 Kel. Pasa Gadang Kec. Pdg. Selatan Kota Padang	Spanduk / Umbul (Gudang Garam)	1 m x 5 m x 1 Sisi	7 Unit	Tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota	525,000	525,000	-
	54	30/10/2019	18 Oktober 2019 /d 27 Oktober 2019	PT. DJARUM Jln. A. Yani-No. 28 Kudus	Vertikal Barner Spanduk / Umbul (Djarum Super)	3 m x 0.9 m x 1 Sisi 1 m x 6 m x 1 Sisi	20 Unit 5 Unit	Tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota	1,260,000	1,260,000	-
	55	31/10/2019	28 Oktober 2019 /d 27 November 2019	PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jambu Air No. 32 Kp. TJ Medan Jambu Ala, Bukittinggi	Shopsign Sticker (Sampoerna)		115 Unit 500 Unit	Tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota	4,208,500	4,208,500	-
	56	31/10/2019	28 Oktober 2019 /d 27 November 2019	PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jambu Air No. 32 Kp. TJ Medan Jambu Ala, Bukittinggi	Vertikal Barner (Sampoerna)	1 m x 3 m x 1 Sisi	10 unit	Tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota	450,000	450,000	-
	57	31/10/2019	27 November 2019 s/d 26 Desember 2019	PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jambu Air No. 32 Kp. TJ Medan Jambu Ala, Bukittinggi	Vertikal Barner (Sampoerna)	1 m x 3 m x 1 Sisi	10 unit	Tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota	450,000	450,000	-
	58	31/10/2019	01 November 2019 s/d 31 Oktober 2020	PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jambu Air No. 32 Kp. TJ Medan Jambu Ala, Bukittinggi	Shopsign (Sampoerna)	1 m x 6 m x 1 Sisi	1 Unit	Tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota	450,000	75,000	375,000
	59	31/10/2019	01 November 2019 s/d 31 Oktober 2020	PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jambu Air No. 32 Kp. TJ Medan Jambu Ala, Bukittinggi	Shopsign (Sampoerna)	1 m x 2 m x 2 Sisi	31 Unit	Tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota	9,300,000	1,550,000	7,750,000
	60	31/10/2019	01 November 2019 s/d 31 Oktober 2020	PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jambu Air No. 32 Kp. TJ Medan	Shopsign (Sampoerna)	1 m x 6 m x 1 Sisi	4 Unit	Tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota	1,800,000	300,000	1,500,000

NO	NO SKPD	TANGGAL	MASA/BERLAKU	REKAMAN/ALAMAT	JENIS REKLAME	UKURAN	JUMLAH	ALAMAT/LETAK REKLAME	JUMLAH PAJAK (Rp)	PENDAPATAN LO TAHUN 2019 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jambu Aia, Bukittinggi							
61		31/10/2019	01 November 2019 s/d 31 Oktober 2020	PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jambu Air No. 32 Kp. Tj Medan Jambu Aia, Bukittinggi	Shopsign Non Pole (Sampoerna)	1 m x 4 m x 1 Sisi	1 Unit	Tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota	300,000	50,000	250,000
62		15/11/2019	Agustus 2019 s/d Agustus 2020	KADE Advertising Linggajarti I No. 2 Tabing Padang	Billboard (Djarum)	10 m x 5 m x 1 sisi	1 Unit	Tj. Pati Kecamatan Harau	6,890,000	2,296,667	4,593,333
63		19/11/2019	19 November 2019 s/d 20 November 2020	Projeka Adv Jln. Raya Jambu Air No. 32 Agam	Shop Sight (Gudang Garam)	1 m x 2 m x 2 Sisi	1 Unit	Toko Ing Limbanang Kecamatan Suliki	300,000	25,000	275,000
64		19/11/2019	19 November 2019 s/d 20 November 2020	Projeka Adv Jln. Raya Jambu Air No. 32 Agam	Neonbox (Gudang Garam)	1 m x 2 m x 1 Sisi	1 Unit	Toko Uwan Lubuk Bangku Kecamatan Harau	200,000	16,667	183,333
65		27/11/2019	November 2019 s/d November 2020	KADE Advertising Linggajarti I No. 2 Tabing Padang	Billboard (Djarum)	6 m x 4 m x 1 Sisi	1 Unit	Suliki	2,340,000	195,000	2,145,000
66		27/11/2019	November 2019 s/d November 2020	KADE Advertising Linggajarti I No. 2 Tabing Padang Riau	Billboard/Balho (Djarum)	6 m x 4 m x 1 Sisi	1 Unit	Lubuk Bangku Kecamatan Harau	2,340,000	195,000	2,145,000
67		22/11/2018	30 November 2019 s/d 29 November 2020	PT Alumada Karya Pratama Jl Raya Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Inhil	Balho Vertikal Front light (Merk PT. Djarum)	6 m x 4 m x 1 Sisi	1 Unit	Simpang Harau Nag Sarilamak Kecamatan Harau	1,800,000	150,000	1,650,000
68		29/11/2019	15 Oktober 2019 s/d 14 Oktober 2020	CV. Grafiz Cipta Rifi, Jl. Hanggar No. 8 RT/RW 002/014 Pekanbaru Riau	Sigh Board/Merk (Merek Dunlop)	4,25 m x 1,2 m x 2 sisi	1 Unit	Bengkel 2 Saudara Sarilamak Kecamatan Harau	1,020,000	255,000	765,000
69		11/12/2019	1 Desember 2019 s/d 31 November 2020	CV. Karya Abang Adek Perkasa Jl. Jendral Soedirman No 24 Koto Nan Gadang Payakumbuh	Neonbox PT. Surya Medistrindo	0.8 m x 2 m x 2 Sisi 1.88 m x 1 m x 2 Sisi	1 Unit 1 Unit	Kuraya Resto Lubuk Bangku Kec. Harau	696,000	58,000	638,000
70		20/12/2019	16 Desember 2019 s/d 15 Januari 2020	PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jambu Air No. 32 Kp. Tj Medan Jambu Aia, Bukittinggi	Vertikal Barmer (Merk Sampoerna)	1 m x 3 m x 1 Sisi	20 Unit	Tersebar di Kabu. Lima Puluh Kota	900,000		900,000
71		20/12/2019	20 Desember 2019 s/d 19 Desember 2020	Cakrawala Adv. Jl. Cendrawasih No 28 Sukajadi Pekanbaru	Shop Sight (Merk) (Merek Dunlop) Perpanjang	4.25 m x 1.2 m x 2 Sisi	1 Unit	Toko Hanum Kec. Luak	765,000		765,000
72		23/12/2019	20 Desember 2019 s/d 19 Desember 2020	CV. Advi Multi Kreasi Jl. Pasar Mudlak No. 86 RT 002 RW 001 Pasa Gadang Padang	Vertikal Barmer Spanduk/Umbul (Gudang Garam)	1 m x 3 m x 1 Sisi 1 m x 6 m x 1 Sisi	10 Unit 10 Unit	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	1,350,000		1,350,000

NO SKPD	TANGGAL	MASA/BERLAKU	REKANAN/ALAMAT	JENIS REKLAME	UKURAN	JUMLAH	ALAMAT/LETAK REKLAME	JUMLAH PAJAK (Rp)	PENDAPATAN LO-TAHUN 2019 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2019/2020
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	31/12/2019	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019	SKP Kecamatan Harau				Tersebar di Kec. Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	11,527,375	11,527,375	-
74	31/12/2019	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019	SKP Kecamatan Pangkalan				Tersebar di Kec. Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota	4,148,750	4,148,750	-
75	31/12/2019	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019	SKP Kecamatan Suliki				Tersebar di Kec. Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota	2,537,500	2,537,500	-
76	31/12/2019	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019	SKP Kecamatan Mungka				Tersebar di Kec. Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota	2,212,500	2,212,500	-
77	31/12/2019	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019	SKP Kecamatan Guguak				Tersebar di Kec. Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota	4,686,500	4,686,500	-
78	31/12/2019	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019	SKP Kecamatan Payakumbuh				Tersebar di Kec. Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	3,505,000	3,505,000	-
799	31/12/2019	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019	SKP Kecamatan Luak				Tersebar di Kec. Luak Kabupaten Lima Puluh Kota	3,225,000	3,225,000	-
80	31/12/2019	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019	SKP Kecamatan Lareh Sago Halaban				Tersebar di Kec. LSH Kabupaten Lima Puluh Kota	987,500	987,500	-
81	31/12/2019	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019	SKP Kecamatan Situjuh Limbo Nagari				Tersebar di Kec. Situjuh Kabupaten Lima Puluh Kota	1,305,000	1,305,000	-
82	31/12/2019	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019	SKP Kecamatan Akabiluru				Tersebar di Kec. Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota	4,767,500	4,767,500	-
							JUMLAH	181,905,725	125,834,792	56,070,133

Sarilamak, Februari 2020
KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



IRWANDI, S.Sos. MM
NIP. 19660913 198603 1 009

LAMPIRAN 7

(Belanja Modal)

DAFTAR : BELANJA MODAL
 BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 TAHUN 2019

NO.	RINCIAN BELANJA MODAL	JUMLAH
1	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	1.784.466.500,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	34.132.500
	Belanja modal pengadaan mesin hitung/jumlah	1.732.500
	Belanja modal pengadaan alat kantor pendingn ruangan/AC	32.400.000
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	819.223.100
	Belanja modal pengadaan Kelengkapan Komputer PC	268.477.000
	Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer	121.475.100
	Belanja modal pengadaan komputer note book/laptop	240.121.000
	Belanja modal pengadaan printer/ploter	169.900.000
	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan	19.250.000
	Belanja Modal Pengadaan Komputer Meja dan Kursi Kerja	399.879.000
	Belanja modal pengadaan meja kerja pejabat	192.035.000
	Belanja modal pengadaan kursi kerja pejabat	77.044.000
	Belanja modal pengadaan lemari, lemari arsip dan filling kabinet	130.800.000
	Belanja Modal Pengadaan Mebeleur	995.000
	Belanja Modal Pengadaan Mebeleur	995.000
	Belanja Modal Pengadaan Gorden	7.350.000
	Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind	7.350.000
	Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	4.806.900
	Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	4.806.900
	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	265.050.000
	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat	265.050.000
	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	223.030.000
	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	24.100.000
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio	179.330.000
	Belanja Modal Pengadaan CCTV	19.600.000
	Belanja Modal Pengadaan Bilboard/Baliho/Whiteboard	30.000.000
	Belanja Modal Pengadaan Bilboard/Baliho/Whiteboard	30.000.000
2	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	322.941.741
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	322.941.741
	Belanja modal pengadaan gudang arsip	244.683.010
	Belanja modal pengadaan pos jaga	78.258.731
	Jumlah	2.107.408.241,00

Sarilamak, Februari 2020
 Kepala Badan Keuangan
 Kabupaten Lima Puluh Kota



IRWANDI, S.Sos. MM
 NIP. 19660913 198603 1 009